

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif terhadap diskualifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan konsep keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia dan Implikasi *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik diwajibkan menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Namun, masih terdapat pelanggaran seperti, kasus di Dapil Gorontalo 6 yang masih terdapat beberapa partai politik gagal memenuhi ketentuan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran keterwakilan perempuan berpotensi menyebabkan pemungutan suara ulang dan terdiskualifikasi partai politik dari pemilu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelaksanaan afirmasi keterwakilan perempuan untuk mencapai keadilan gender dalam sistem demokrasi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan serta pentingnya regulasi yang tegas untuk memastikan keterwakilan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan membutuhkan komitmen lebih kuat dari partai politik dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara substansional dalam politik.

Kata kunci : Keterwakilan perempuan, Pemilu legislatif, Diskualifikasi partai politik

ABSTRACT

This study discusses women's representation in legislative elections concerning the disqualification of political parties as election participants. The research aims to examine the regulatory framework for women's representation in legislative elections in Indonesia and the implications of the ratio decidendi in Constitutional Court Decision Number 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 on the potential disqualification of political parties. Based on Law Number 7 of 2017 on General Elections, political parties are required to include at least 30% women's representation in their legislative candidate lists. However, violations still occur, such as the case in Electoral District Gorontalo 6, where several political parties failed to meet the requirements. The Constitutional Court's decision states that violations of women's representation may lead to a re-election and the disqualification of political parties from elections. This study highlights the importance of implementing affirmative action for women's representation to achieve gender equality in a democratic system. Additionally, it identifies structural and cultural barriers affecting low female participation and underscores the need for strict regulations to ensure effective representation. A normative approach is used, analyzing legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that implementing the 30% women's representation quota requires stronger commitments from political parties and election organizers to substantially enhance women's participation in politics.

Keywords: *Women's representation, Legislative elections, Political party disqualification*